

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, AKUNTABILITAS, DAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TERHADAP INDIKASI KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022)

Galuh Try Anggono, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of fiscal decentralization, accountability, and e-government on indications of corruption in local governments, with a focus on districts and cities in East Java Province in 2019–2022. The main objective of this study is to evaluate how these variables affect corruption indications and provide empirical evidence for policy and governance improvements.

This research uses a quantitative approach with panel data regression analysis. The independent variables in this study include fiscal decentralization, audit opinion, performance accountability, and e-government. Control variables such as the Human Development Index (HDI) and personnel expenditure are also considered. Data was collected from various official reports and analyzed using EViews 13 software.

The results showed that fiscal decentralization and performance accountability have a positive but statistically insignificant effect on corruption indications, while audit opinion and e-government systems have a negative and significant effect. The adjusted R-squared value of 0,3977 indicates that about 39,77% of the variation in corruption indications can be explained by the independent variables and control variables in this model, which indicates that other factors not studied can also contribute to the level of corruption.

Keywords: Fiscal Decentralization, Accountability, E-Government, Corruption

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengimplementasikan desentralisasi sebagai upaya untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dimulai dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25/1999 direvisi menjadi UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah direvisi kembali menjadi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini didorong oleh situasi politik pasca 1998 yang menghendaki perubahan dari sistem pemerintahan yang sangat sentralistik menuju sistem yang lebih desentralistik.

Peraturan yang telah direvisi tersebut memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk mencapai otonomi daerah yang lebih komprehensif, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Hal ini dicapai dengan mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional (Hamidi, U.S. & Puspita, D. ed., 2021). Selain itu, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat ditingkatkan dengan implementasi desentralisasi fiskal, yang diharapkan dapat mendorong perimbangan keuangan dan otonomi daerah (Saputra & Setiawan, 2021).

Implementasi desentralisasi fiskal tidak hanya memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah dalam hal pengumpulan dan pengelolaan pendapatan, tetapi juga menuntut peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan akuntabel. Hal ini merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah mendapatkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Semakin tinggi tingkat

¹ Corresponding author

desentralisasi fiskal yang diiringi dengan pengawasan dan pengelolaan keuangan yang baik dapat mewujudkan kesejahteraan bagi semua rakyat di daerah otonom (Saputra & Madani, 2012).

Meskipun desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik, namun penerapannya juga menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya praktik korupsi di tingkat daerah. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Kurniawan (2011) dan Alfada (2019) mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan peluang bagi pejabat daerah untuk terlibat dalam praktik korupsi jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Data dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus korupsi di berbagai daerah termasuk terdapat keterlibatan oknum kepala daerah. Berbagai provinsi termasuk di Jawa Timur yang secara konsisten menduduki posisi pertama dengan jumlah korupsi terbanyak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah memperkenalkan berbagai inisiatif, termasuk peningkatan akuntabilitas yang dilihat dari dua aspek, yaitu akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang diproses dengan opini audit melalui laporan keuangan, serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan daerah, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan SPBE terhadap indikasi korupsi melalui studi empiris kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2022.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini akan menjelaskan landasan teori yang diterapkan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. Penelitian ini mengkaji pengaruh beberapa variabel terhadap indikasi korupsi di pemerintah daerah, yaitu desentralisasi fiskal, opini audit, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Variabel kontrol yang digunakan adalah Human Development Index (HDI) dan belanja pegawai.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Landasan teori dalam penelitian ini berdasarkan pada teori keagenan (*agency theory*). Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yang dapat terdiri dari individu, kelompok, atau organisasi. Prinsipal adalah pihak yang membuat keputusan dan memberikan mandat kepada agen untuk melaksanakan tugas atas namanya. Inti dari teori ini adalah merancang kontrak kerja yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dengan agen.

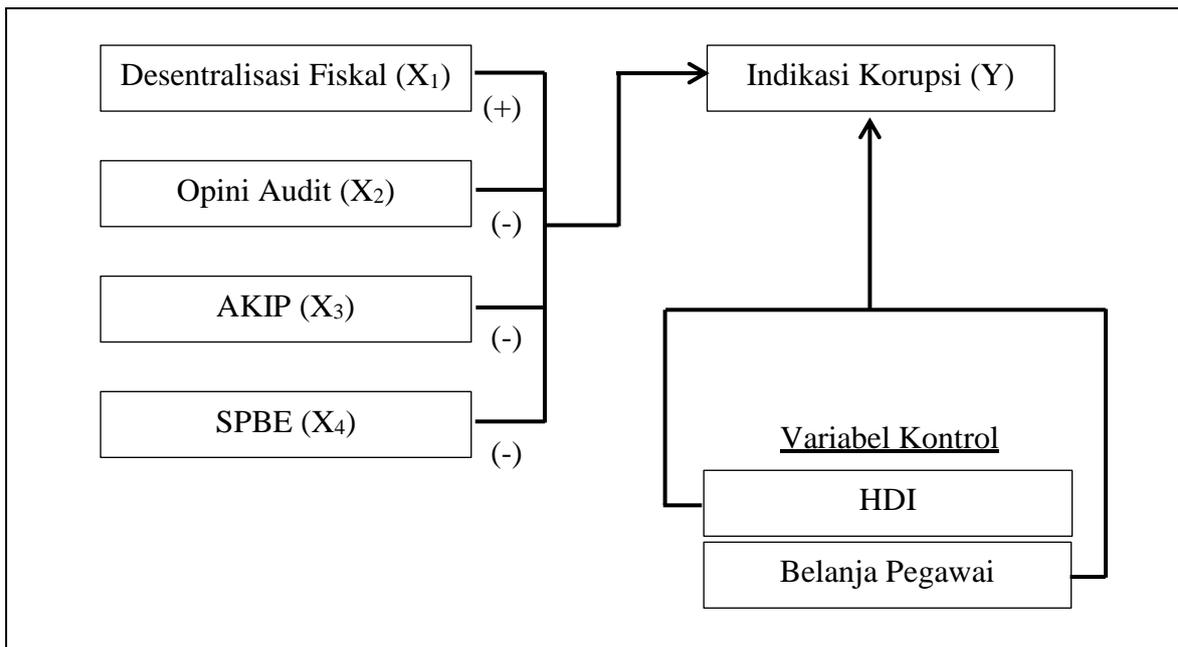
Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal (rakyat) dan agen (pemerintah daerah), di mana agen diberikan mandat oleh prinsipal untuk mengelola sumber daya dan memberikan layanan publik. Teori ini menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk mengurangi risiko korupsi akibat adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal. Karena prinsipal (rakyat) tidak selalu mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh agen (pemerintah daerah), terjadi asimetri informasi. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan pihak ketiga yang dapat meyakinkan bahwa apa yang dilaporkan oleh pemerintah daerah adalah benar adanya. Dalam posisi sebagai pihak ketiga ini, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut andil dalam melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya (Santoso & Pambelum, 2008). Untuk memperbaiki asimetri informasi, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai mekanisme *checks and balances* dan juga menerapkan peningkatan SPBE sebagai bentuk transparansi.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Desentralisasi Fiskal dan Korupsi

Derajat desentralisasi fiskal yang tinggi berarti pemerintah daerah memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya keuangan, tetapi tanpa pengawasan yang efektif, ini dapat menyebabkan peningkatan moral hazard dan *adverse selection*. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah daerah, tanpa pengawasan yang kuat dan sistem akuntabilitas yang transparan, hal ini dapat berpotensi meningkatkan tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Penelitian tentang bagaimana desentralisasi mempengaruhi korupsi menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Fisman & Gatti (2002) menemukan hubungan negatif yang signifikan antara korupsi dan desentralisasi. Saputra & Setiawan (2021) dan Changwony & Paterson (2019) mendukung kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal menurunkan tingkat korupsi. Suprayitno & Pradiptyo (2017) dan Alfada (2019) memiliki temuan yang berbeda, menyatakan bahwa desentralisasi fiskal secara signifikan dan positif mempengaruhi peningkatan korupsi. Tingkat korupsi di suatu daerah meningkat seiring dengan jumlah uang yang mengalir ke setiap daerah (Maria *dkk.*, 2019). Berdasarkan kondisi tersebut, hipotesis terkait desentralisasi fiskal adalah

H₁ = Desentralisasi fiskal memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap indikasi korupsi.

Opini Audit dan Korupsi

Opini audit yang memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa laporan keuangan dianggap transparan dan akurat, yang mendorong agen untuk bertindak lebih hati-hati karena kesalahan atau penyimpangan akan terdeteksi oleh auditor. Opini audit yang buruk, seperti opini tidak wajar atau opini dengan pengecualian, mengindikasikan adanya ketidakberesan atau potensi korupsi, yang dapat memicu tindakan korektif atau pemberian sanksi kepada pejabat yang terlibat. Dengan demikian, opini audit berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya membantu meminimalkan korupsi di pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fithri & Hapsari (2021) menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara peningkatan atau perbaikan opini audit tahunan di pemerintah daerah dengan penurunan tingkat korupsi yang konsisten dari waktu ke waktu. Terdapat hubungan terbalik antara kualitas opini audit dan tingkat korupsi. Namun demikian, ada beberapa sudut pandang yang berbeda seperti Fatimah *dkk.* (2023) yang menunjukkan bahwa opini audit yang positif tidak serta merta

menjamin tidak adanya korupsi di dalam pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, hipotesis terkait opini audit adalah

H_2 = Opini audit memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap indikasi korupsi.

Akuntabilitas Kinerja dan Korupsi

Akuntabilitas kinerja berperan sebagai mekanisme untuk memastikan agen bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan, sesuai dengan tujuan dan kepentingan prinsipal. Dengan meningkatkan transparansi dan pengawasan, akuntabilitas kinerja membantu mengurangi asimetri informasi yang sering menjadi akar permasalahan dalam hubungan keagenan. Hal ini meminimalkan peluang bagi agen untuk terlibat dalam praktik korupsi, karena tahu tindakan agen akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mengurangi peluang korupsi, sesuai dengan prinsip-prinsip teori agen.

Menurut Yuliyana & Setyaningrum (2016), untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi diperlukan akuntabilitas kinerja, yang merupakan ekspresi dari manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Peningkatan akuntabilitas secara signifikan berdampak pada pemberantasan korupsi (Afriyanti *dkk.*, 2018). Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018) menemukan bahwa akuntabilitas memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Akuntabilitas kinerja berdampak negatif terhadap korupsi, terutama pada pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas yang lemah (Muhtar *dkk.*, 2018). Sedangkan menurut Fuadi & Mabur (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja tidak memiliki dampak yang jelas terhadap naik atau turunnya korupsi. Berdasarkan kondisi tersebut, hipotesis terkait akuntabilitas kinerja adalah

H_3 = Akuntabilitas kinerja memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap indikasi korupsi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Korupsi

Dari sudut pandang teori agen, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government berperan penting dalam mengurangi korupsi. Dengan meningkatkan transparansi, digitalisasi layanan publik membuat informasi lebih mudah diakses, mengurangi asimetri informasi antara pemerintah (prinsipal) dan pejabat (agen). Pencatatan dan pelacakan transaksi secara elektronik memastikan tindakan agen dapat diaudit, mengurangi motivasi korupsi. Selain itu, dengan mengurangi interaksi langsung melalui layanan online, peluang untuk suap dan pemerasan juga berkurang. Dengan demikian, SPBE/e-government berfungsi sebagai alat untuk mengurangi moral hazard dan adverse selection dalam hubungan antara prinsipal dan agen, sehingga mengurangi peluang dan insentif bagi agen untuk korupsi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh Yuliyana & Setyaningrum (2016) bahwa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenalan e-government memiliki dampak yang merugikan terhadap persepsi korupsi. Penerapan e-government akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintah, merampingkan proses layanan, dan mengurangi interaksi langsung antara pengguna layanan dan petugas, sehingga mengurangi korupsi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pane & Haryanto (2023), e-government berdasarkan banyaknya jumlah website yang dimiliki oleh instansi pemerintah tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap berkurang atau bertambahnya korupsi. Berdasarkan kondisi tersebut, hipotesis terkait SPBE adalah

H_4 = SPBE/E-Government memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap indikasi korupsi.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian yang diimplementasikan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2022. Pemilihan populasi ini didasarkan pada fakta bahwa

Jawa Timur masih memiliki jumlah kasus korupsi tertinggi di Indonesia untuk saat ini dibandingkan dengan provinsi lain (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Selain itu, pemilihan tahun 2019-2022 dilakukan karena rentang tahun tersebut merupakan data terbaru dengan kesetaraan data yang tersedia untuk tiap indikator pengukuran variabel. Tahun tersebut dapat dilihat dari perkembangan tingkat korupsi berdasarkan laporan ICW, posisi Jawa Timur masih menduduki peringkat teratas dengan jumlah tingkat korupsi terbanyak.

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana pemilihan sampel didasarkan pada kriteria dan pertimbangan spesifik yang telah ditentukan oleh peneliti. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif dan relevan dengan kriteria penelitian. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menyampaikan LKPD untuk tahun 2019-2022 kepada BPK untuk dilakukan audit.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdapat pokok-pokok temuan kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam LHP atas LKPD (*audited*) untuk tahun 2019-2022.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah melakukan evaluasi AKIP untuk tahun 2019-2022.
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah terdapat indeks SPBE untuk tahun 2019-2022 dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Variabel dan Pengukurannya

Tabel 1 Variabel dan Pengukurannya

| Variabel Penelitian | Indikator Pengukuran |
|----------------------------|---|
| Indikasi Korupsi | Ln jumlah nilai rupiah temuan nilai kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan dan ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang terdapat di LHP BPK atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan sistem pengendalian internal. |
| Desentralisasi Fiskal | Pengukuran tingkat desentralisasi fiskal dengan menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. |
| | $DF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$ |
| Opini Audit | Menggunakan skala ordinal: WTP = 4 WDP = 3 TW = 2 TMP = 1 |
| Akuntabilitas Kinerja SPBE | Diukur menggunakan nilai evaluasi AKIP. SPBE. = Indeks SPBE Daerah x |
| HDI | HDI = <i>Human Development Index</i> Daerah x |
| Belanja Pegawai | BP = Total Belanja Pegawai Daerah x |

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengevaluasi hipotesis. Ada beberapa keuntungan menggunakan data panel. Pertama, data panel, yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross-section*, dapat memberikan lebih banyak informasi, sehingga menghasilkan derajat kebebasan yang lebih tinggi. Kedua, mengintegrasikan informasi dari data *time series* dan *cross-section* dapat membantu mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh variabel yang hilang (*omitted-variabel*) (Widarjono, 2018).

Dalam penelitian ini, alat bantu pengolahan statistik yang digunakan adalah EViews 13. Sebelum data diimpor ke EViews 13, tabulasi data diolah terlebih dahulu menggunakan *Microsoft Excel* dan kemudian dilakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam

beberapa tahapan, yaitu statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis (uji t, uji F, dan uji R²).

Model ini dapat diestimasi menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS), dengan persamaan berikut:

$$\text{LnINKOR}_{it} = \alpha + \beta_1\text{DES FIS}_{it} + \beta_2\text{OPINI}_{it} + \beta_3\text{AKIP}_{it} + \beta_4\text{SPBE}_{it} + \beta_5\text{HDI}_{it} + \beta_6\text{LnBP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- LnINKOR = Log n Indikasi Korupsi di waktu t untuk *cross-section* i
- A = Konstanta
- B = Koefisien regresi variabel
- DS = Desentralisasi Fiskal
- OPINI = Opini Audit
- AKIP = Akuntabilitas Kinerja
- SPBE = Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- HDI = *Human Development Index*
- LnBP = Log n Belanja Pegawai
- E = Komponen *error* di waktu t untuk unit *cross-section* i
- i = Urutan pemerintah kabupaten/kota (*cross-section*)
- t = Periode waktu (*time series*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan mencakup penjelasan mengenai pemilihan sampel serta hasil temuan penelitian, yang meliputi analisis statistik deskriptif, pengujian pemilihan model, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi yang terdiri dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2022. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun langkah-langkah pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Pemilihan Sampel

| Keterangan | Sampel |
|---|--------|
| Total kabupaten/kota | 38 |
| Total kabupaten/kota dengan SPBE belum dievaluasi | (24) |
| | 14 |
| Dikali periode waktu (tahun) | 4 |
| Total Sampel | 56 |

Statistik Deskriptif

Gambaran umum data deskriptif dari suatu kumpulan data diberikan oleh hasil analisis statistik deskriptif. Analisis ini ditunjukkan dengan nilai maksimum, minimum, median, mean, dan standar deviasi dari variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Tabel 3 menampilkan hasil statistik deskriptif penelitian ini.

Tabel 3 Statistik Deskriptif

| Variabel | n | Mean | Median | Maximum | Minimum | Std. Dev. |
|----------|----|----------|----------|----------|----------|-----------|
| DES FIS | 56 | 0,170581 | 0,173354 | 0,308107 | 0,099296 | 0,045036 |
| OPINI | 56 | 3,875000 | 4 | 4 | 1 | 0,506772 |
| AKIP | 56 | 70,05679 | 70,15500 | 77,29000 | 60,75000 | 4,387941 |
| SPBE | 56 | 2,577857 | 2,570000 | 3,560000 | 1,830000 | 0,391643 |
| HDI | 56 | 71,90446 | 72,01000 | 79,93000 | 65,33000 | 4,414974 |
| LN_BP | 56 | 27,25310 | 27,37897 | 28,01379 | 23,63661 | 0,656672 |

LN_INKOR 56 22,30383 22,28677 29,58670 17,07429 2,300065

Sumber: hasil olah data EViews 13

Pemilihan Model

Untuk menemukan model terbaik di antara ketiga model persamaan tersebut, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), maka perlu dilakukan pengujian terhadap masing-masing model tersebut.

Tabel 4 Uji Chow

| Effects Test | Statistic | df | Prob. |
|---------------------------------|-----------|---------|---------------|
| <i>Cross-section F</i> | 1,520823 | (13,36) | 0,1573 |
| <i>Cross-section Chi-square</i> | 24,512864 | 13 | 0,0267 |

Sumber: hasil olah data EViews 13

Tabel 5 Uji Lagrange Multiplier (LM)

| | Test Hypothesis | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | <i>Cross-section</i> | <i>Time</i> | <i>Both</i> |
| <i>Breusch-Pagan</i> | 0,886241 (0,3465) | 1,081510 (0,2984) | 1,967751 (0,1607) |

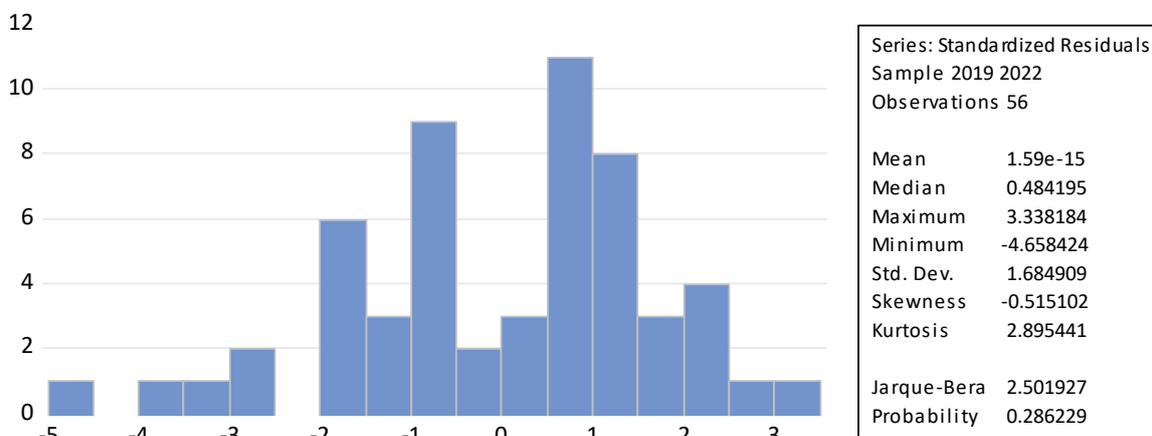
Sumber: hasil olah data EViews 13

Pada Tabel 4 dilakukan uji Chow yang menghasilkan *prob. Cross-section F* sebesar **0,1573**. Nilai tersebut lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa model yang terpilih adalah *common effect model*. Sehingga dilanjutkan untuk dilakukan uji LM yang dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai *Breusch-Pagan* pada uji LM sebesar **0,1607** yang menandakan lebih dari 0,05 berarti model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *common effect model*. Karena pada saat uji Chow dan uji LM dilakukan dan secara konsisten memiliki hasil bahwa *common effect model* yang terpilih, maka dengan ini uji Hausman tidak perlu dilakukan.

Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Walaupun beberapa pendapat menyatakan uji asumsi klasik pada data panel OLS hanya melakukan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja, namun peneliti mencoba untuk melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Untuk mengetahui hasil keseluruhan asumsi klasik yang diuji akan dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 2 Uji Normalitas



Sumber: hasil olah data EViews 13

Pada Gambar 2 terlihat bahwa nilai probabilitas uji normalitas sebesar 0,286229 yang menandakan lebih dari 0,05 berarti data pada penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 6 Uji Mutikolinearitas

| | DESFIS | OPINI | AKIP | SPBE | HDI | LN_BP |
|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| DESFIS | 1,00000 | | | | | |
| OPINI | -0,02019 | 1,00000 | | | | |
| AKIP | 0,23901 | 0,44470 | 1,00000 | | | |
| SPBE | 0,23731 | 0,25421 | 0,22310 | 1,00000 | | |
| HDI | 0,50181 | 0,21511 | 0,11415 | 0,33674 | 1,00000 | |
| LN_BP | 0,00560 | -0,20474 | 0,10062 | -0,18790 | -0,50317 | 1,00000 |

Sumber: hasil olah data EViews 13

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai matriks korelasi tidak ada yang melebihi 0,85. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel sehingga dapat dikatakan penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| <i>F-statistic</i> | 1,71010 | <i>Prob. F (6,49)</i> | 0,13854 |
| <i>Obs*R-squared</i> | 9,69605 | <i>Prob. Chi-Square (6)</i> | 0,13805 |
| <i>Scaled explained SS</i> | 7,00312 | <i>Prob. Chi-Square (6)</i> | 0,32056 |

Sumber: hasil olah data EViews 13

Berdasarkan hasil uji Glejser yang ditampilkan dalam Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas pada ketiga uji yang digunakan, yaitu *F-statistic*, *ObsR-squared*, dan *Scaled explained SS*. Probabilitas dari *F-statistic* adalah 0,13854, sementara probabilitas dari *ObsR-squared* dan *Scaled explained SS* masing-masing adalah 0,13805 dan 0,32056. Ketiga nilai probabilitas tersebut lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, variabilitas residual tidak menunjukkan pola yang sistematis terhadap variabel independen dalam model, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis yang dapat dilihat pada Tabel 8. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 8 Uji Hipotesis

| <i>Variable</i> | <i>Coefficient</i> | <i>Std. Error</i> | <i>t-Statistic</i> | <i>Prob.</i> |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| C | 62,61022 | 15,91433 | 3,93420 | 0,00026 |
| DESFIS | 5,76168 | 6,87443 | 0,83813 | 0,40603 |
| OPINI | -1,83143 | 0,57256 | -3,19869 | 0,00242 |
| AKIP | 0,00698 | 0,06583 | 0,10606 | 0,91597 |
| SPBE | -1,48509 | 0,67478 | -2,20086 | 0,03249 |
| HDI | -0,21919 | 0,07990 | -2,74335 | 0,00847 |
| LN_BP | -0,55378 | 0,46091 | -1,20151 | 0,23533 |
| <i>R-squared</i> | 0,463373 | | | |
| <i>Adjusted R-squared</i> | 0,397663 | | | |
| <i>F-statistic</i> | 7,051836 | | | |
| <i>Prob(F-statistic)</i> | 0,000019 | | | |

Dependent variable LN_INKORUP Log natural Indikasi Korupsi

Sumber: hasil olah data EViews 13

Pada Tabel 8 telah dilakukan uji hipotesis dengan persamaan regresi data panel dengan model CEM. Oleh karena itu, akan dijabarkan masing-masing pengujian hipotesis seperti uji t, uji F, dan analisis koefisien determinasi (R^2). Berikut hasil penjelesannya:

1. Uji t

Uji t untuk menentukan sejauh mana variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh pengaruh satu variabel independent Selain itu, terdapat kriteria pengujian statistik yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis penelitian diterima karena koefisien regresi signifikan dan secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan begitu juga sebaliknya.

Desentralisasi fiskal memiliki koefisien positif dan nilai prob. t-statistik sebesar 0,4060, yang berarti bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indikasi korupsi (**H₁ ditolak**). Penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian dari Saputra & Setiawan (2021) dan Changwony & Paterson (2019) yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal yang tinggi dapat membantu mengurangi tingkat korupsi. Sebaliknya, Suprayitno & Pradipto (2017) dan Alfada (2019) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan korupsi. Menurut Maria dkk. (2019), semakin besar dana yang dialokasikan ke daerah, maka tingkat korupsi di daerah tersebut juga semakin tinggi.

Opini audit memiliki koefisien negatif dan nilai prob. t-statistik sebesar 0,00242, yang berarti bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indikasi korupsi (**H₂ diterima**). Hal ini didukung juga oleh penelitian Fithri & Hapsari (2021) yang menyatakan bahwa perbaikan berkelanjutan dalam opini audit yang diperoleh oleh pemerintah daerah, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dapat berdampak pada penurunan tingkat korupsi. Semakin baik opini audit yang diperoleh, semakin rendah tingkat korupsi yang terjadi.

Akuntabilitas kinerja (AKIP) memiliki koefisien positif dan nilai prob. t-statistik sebesar 0,91597, yang berarti bahwa AKIP memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indikasi korupsi (**H₃ ditolak**). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Yuliyana & Setyaningrum (2016), yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah adalah langkah dalam pencegahan fraud. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fuadi & Mabur (2021) dan Saputra & Setiawan (2021), yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.

SPBE memiliki koefisien negatif dan nilai prob. t-statistik sebesar 0,03249, yang berarti bahwa SPBE memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indikasi korupsi (**H₄ diterima**). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yuliyana & Setyaningrum (2016) dan Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018), yang menyatakan bahwa teknologi mempermudah akses informasi dan penelusuran data, sehingga dapat mengurangi tindakan yang melanggar peraturan. Dengan keterbukaan informasi, tingkat pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi lebih efektif. Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government yang baik memudahkan akses masyarakat kepada layanan pemerintah, menyederhanakan proses pelayanan, serta mengurangi interaksi langsung antara pengguna layanan dan petugas, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi korupsi.

Selanjutnya, akan dijelaskan pengaruh variabel kontrol terhadap variabel dependen. Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu HDI dan Belanja Pegawai. HDI memiliki koefisien negatif dan nilai prob. t-statistik sebesar 0,00847, yang berarti bahwa HDI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indikasi korupsi. Belanja pegawai memiliki koefisien negatif dan nilai prob. t-statistik sebesar 0,23533, yang berarti bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap indikasi korupsi.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika uji statistik F kurang dari 0,05, mengindikasikan bahwa semua faktor independen memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika uji statistik F menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0,05, hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh secara bersama-sama seluruh faktor independen terhadap variabel dependen tidak signifikan. Pada tabel 8, hasil uji F menunjukkan nilai F-statistik sebesar 7,051836 dengan Prob. F-statistik sebesar 0,000019. Nilai probabilitas ini jauh di bawah ambang batas signifikansi 0,05, yang berarti bahwa semua variabel independen dalam model ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam model menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih dekat ke 1 menunjukkan bahwa model tersebut dapat menjelaskan sebagian besar variasi dari variabel dependen. Pada Tabel 4.7, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,397663 menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model regresi, sekitar 39,77% variasi dalam indikasi korupsi di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol yang termasuk dalam model ini dan ada sekitar 60,23% variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model ini, yang mungkin disebabkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini mencakup kesimpulan penelitian, keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, serta saran untuk penelitian di masa mendatang.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal, opini audit, akuntabilitas kinerja (AKIP), dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terhadap indikasi korupsi di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2022. Melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel, penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal dan akuntabilitas kinerja memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indikasi korupsi. Sementara itu, opini audit dan SPBE memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan akuntabilitas kinerja belum efektif dalam mengurangi korupsi tanpa adanya pengawasan yang memadai. Sebaliknya, opini audit yang baik dan penerapan SPBE mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga efektif dalam menurunkan tingkat korupsi. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan desentralisasi dan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi korupsi di tingkat daerah.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Pertama, penelitian ini hanya mencakup data dari tahun 2019 hingga 2022 dan terbatas pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk periode waktu yang lebih panjang atau untuk daerah lain di Indonesia. Kedua, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi, yang dapat memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan kelengkapan data. Ketiga, model analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu regresi data panel dengan pendekatan *Common Effect Model* (CEM), mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Keempat, penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel kontrol seperti Human Development Index (HDI) dan belanja pegawai, sementara faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi indikasi korupsi, seperti budaya organisasi atau pengawasan eksternal, tidak termasuk dalam model. Keterbatasan-keterbatasan ini mengindikasikan perlunya penelitian lanjutan dengan cakupan waktu yang lebih panjang, wilayah yang lebih luas, dan penggunaan variabel-variabel tambahan untuk memberikan pemahaman yang

lebih komprehensif mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan e-government terhadap indikasi korupsi.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk perbaikan kebijakan dan praktik dalam pemerintahan daerah guna mengurangi indikasi korupsi.

Pertama, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal. Meskipun desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan daerah, tanpa pengawasan yang efektif, hal ini dapat menjadi celah bagi terjadinya korupsi. Pemerintah pusat perlu memperkuat sistem pengawasan dan audit untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara transparan dan akuntabel.

Kedua, peningkatan kualitas opini audit sangat penting dalam mengurangi indikasi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit yang baik, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berkorelasi dengan rendahnya tingkat korupsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan kualitas laporan keuangannya agar dapat memperoleh opini audit yang lebih baik. Langkah-langkah ini dapat mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah serta penerapan standar akuntansi yang ketat.

Ketiga, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government harus ditingkatkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa SPBE memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi indikasi korupsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi publik, memantau kinerja aparatur, serta mengurangi interaksi langsung yang dapat menjadi peluang korupsi.

Keempat, penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja belum memiliki pengaruh signifikan terhadap indikasi korupsi, namun meningkatkan akuntabilitas tetap menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan sistem evaluasi kinerja, pemberian insentif bagi aparatur yang berprestasi, serta penegakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Kelima, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi indikasi korupsi di pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 60% variasi dalam indikasi korupsi belum dapat dijelaskan oleh model yang digunakan, yang mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang belum teridentifikasi. Penelitian lanjutan dapat membantu memahami lebih dalam tentang dinamika korupsi di tingkat daerah dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengurangi indikasi korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

- Afriyanti, D., Sabanu, H.G. & Noor, F. 2018. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1): 21–42.
- Alfada, A. 2019. Does Fiscal Decentralization Encourage Corruption in Local Governments? Evidence from Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(3): 118.
- Changwony, F.K. & Paterson, A.S. 2019. Accounting practice, fiscal decentralization and corruption. *The British Accounting Review*, 51(5): 100834.
- Fatimah, S., Yasin, M., Manan, A., Salmah, E. & Sriningsih, S. 2023. Analisis Variabel Determinan Tingkat Korupsi Di Indonesia. *Ekonobis*, 9(2). Tersedia di <http://www.ekonobis.unram.ac.id>.
- Fisman, R. & Gatti, R. 2002. Decentralization and corruption: evidence across countries. *Journal of Public Economics*, 83(3): 325–345.
- Fithri, N. & Hapsari, D.W. 2021. Tingkat Korupsi Pada Pemda Provinsi Jawa Barat Dan Banten. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(3).
- Fuadi, I. & Maburur, A. 2021. Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4): 317–328.
- Hamidi, U.S. & Puspita, D. ed., 2021. *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: PKAPBN BKF.
- Indonesia Corruption Watch 2022. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi*. Jakarta.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, Q North-Holland Publishing Company.
- Kurniawan, T. 2011. Democratic Decentralization And Corruption in Indonesia: Why Decentralization has Caused Head of Regions Affected by Corruption Cases. *Administrative Sciences Department, University of Indonesia*.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E. & Miharjo, S. 2019. Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1): 1–22.
- Muhtar, Sutaryo & Sriyanto 2018. Corruption in Indonesian local government: Study on Triangle Fraud Theory. *International Journal of Business and Society*, 19: 536–552.
- Pane, G. & Haryanto 2023. Pengaruh E-Government, Gaji dan Tunjangan PNS, dan Produk Domestik Regional Bruto Sebagai Probabilitas Terjadinya Korupsi di Indonesia. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(2): 1–9.
- Rahayuningtyas, D.P.A. & Setyaningrum, D. 2018. Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(4).
- Santoso, U. & Pambelum, Y.J. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah. *Jurnal Administrasi Bisnis (2008)*, 4(1): 14–33.

- Saputra, B. & Madani, M. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *JAAI*, 16(2): 185–199.
- Saputra, N.A.A. & Setiawan, D. 2021. Fiscal Decentralization, Accountability and Corruption Indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 29–40.
- Suprayitno, B. & Pradipto, R. 2017. Fiscal Decentralization and Corruption: The Facts in Regional Autonomy in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 8(5): 1467–1483.
- Widarjono, A. 2018. *Ekonometrika*. 5 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yuliyana, I. & Setyaningrum, D. 2016. Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Simposium Nasional Akuntansi XIX. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.